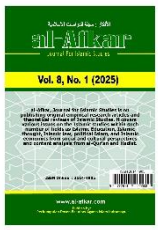

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: https://al-afkar.com

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1860

Vol. 8 No. 2 (2025)
pp. 1372-1380

Research Article

Moderasi Beragama Dalam Sudut Pandang KMA 450

Siti Ropiah[1], Muhamad Abduh[2]

1. STAI Haji Agus Salim Cikarang, Indonesia
E-mail: ropiah@staihas.ac.id

2. STAI Haji Agus Salim Cikarang, Indonesia
E-mail: edhurosadioo@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Received	: January 15, 2025	Revised	: February 27, 2025
Accepted	: March 12, 2025	Avalable online	: May 16, 2025

How to Cite: Siti Ropiah and Muhamad Abduh (2025) "Religious Moderation from the Perspective of KMA 450", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1372–1380. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1860.

Religious Moderation from the Perspective of KMA 450

Abstract. This study aims to analyze the implementation of religious moderation based on the Regulation of the Minister of Religious Affairs (KMA) No. 450 in Indonesia, particularly in education and religious life. KMA No. 450 emphasizes the importance of applying the principles of moderation, such as balance, tolerance, justice, and respect for diversity, as an effort to foster harmony in a plural society. Religious moderation not only serves as a foundation in religious education curricula but also as a guideline in social interactions. The research employs a qualitative descriptive approach by examining the document of KMA No. 450 and its supporting policies. The findings reveal that KMA No. 450 has a positive impact on shaping moderate attitudes among students and the community. The values of religious moderation taught through Islamic religious education help prevent intolerance and extremism while nurturing awareness of the importance of coexisting in diversity. However, its

implementation faces challenges, such as resistance from certain groups and limited resources. The study recommends enhancing the dissemination of moderation values, providing training for educators, and developing curricula and teaching materials based on religious moderation. With proper implementation, KMA No. 450 has the potential to serve as a strategic guide in fostering peaceful and harmonious religious life in Indonesia.

Keywords: Religious Moderation, KMA No. 450, Islamic Religious Education, Tolerance, Religious Life.

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan moderasi beragama berdasarkan Ketetapan Menteri Agama (KMA) No. 450 di Indonesia, terutama dalam pendidikan dan kehidupan beragama. KMA No. 450 menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip moderasi seperti keseimbangan, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keragaman sebagai upaya untuk membangun harmoni di tengah masyarakat yang plural. Moderasi beragama tidak hanya menjadi dasar dalam kurikulum pendidikan agama, tetapi juga menjadi panduan dalam interaksi sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menelaah dokumen KMA No. 450 serta kebijakan-kebijakan pendukungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KMA No. 450 memiliki dampak positif terhadap pembentukan sikap moderat di kalangan siswa dan masyarakat. Nilai-nilai moderasi beragama yang diajarkan melalui pendidikan agama Islam membantu mencegah intoleransi dan ekstremisme, serta memupuk kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Namun, penerapan ini juga menghadapi tantangan, seperti resistensi dari sebagian kelompok dan keterbatasan sumber daya. Studi ini menyarankan peningkatan sosialisasi nilai moderasi, pelatihan untuk pendidik, serta pengembangan kurikulum dan bahan ajar berbasis moderasi beragama. Dengan implementasi yang tepat, KMA No. 450 berpotensi menjadi panduan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama yang damai dan harmonis di Indonesia.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, KMA No. 450, Pendidikan Agama Islam, Toleransi, Kehidupan Beragama.

PENDAHULUAN

Moderasi beragama menjadi prinsip penting dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia. Dalam konteks Kementerian Agama, moderasi beragama diatur dan diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 450 Tahun 2019. Dokumen ini menekankan pentingnya nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, keseimbangan, dan komitmen terhadap kebangsaan, dalam membentuk praktik keberagamaan yang inklusif dan anti-ekstremisme. KMA-450 berperan sebagai pedoman utama dalam menyelaraskan ajaran agama dengan kebutuhan pluralitas masyarakat Indonesia[1].

Nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama ini selaras dengan pandangan bahwa agama seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan sumber konflik. Sebagaimana diungkapkan oleh, moderasi beragama mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keimanan. KMA 450 mempertegas pentingnya keterlibatan seluruh elemen pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai ini[2].

[1] Muchlis M. Hanafi *Moderasi Beragama: Dari Konsep ke Implementasi* (Jakarta: Kementerian Agama, 2020), hlm. 25

[2] Zainal Arifin, *Membangun Toleransi Antarumat Beragama* (Bandung: Rosda, 2021), hlm. 45-47

Selain itu, pendidikan agama Islam juga menjadi salah satu ruang implementasi moderasi beragama yang sangat strategis. Moderasi dapat diterapkan melalui kurikulum yang mengedepankan toleransi dan dialog antaragama. KMA 450 menyediakan landasan hukum untuk menjadikan moderasi beragama sebagai bagian integral dari proses pembelajaran[3].

Dengan demikian, moderasi beragama menurut KMA No. 450 tidak hanya sekadar wacana, tetapi juga menjadi strategi yang konkret dalam menangani tantangan ekstremisme dan intoleransi di Indonesia. Keberhasilan implementasi moderasi beragama sangat tergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas[4]

Berdasarkan kebijakan ini, ada beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi untuk memahami penerapan dan dampak moderasi beragama secara lebih mendalam:

1. Bagaimana prinsip-prinsip moderasi beragama dalam KMA No. 450 diterapkan dalam pendidikan dan kehidupan beragama di Indonesia?
2. Bagaimana dampak KMA No. 450 terhadap pembentukan sikap moderat di kalangan siswa dan masyarakat?
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan moderasi beragama menurut KMA No. 450?

METODE PENELITIAN

Dalam membahas moderasi beragama sesuai KMA No. 450, metode penelitian yang umum digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini sering mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami konsep moderasi beragama dan implementasinya dalam konteks pendidikan dan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian digunakan studi dokumen, wawancara, dan observasi. Studi dokumen membantu memahami konteks historis, filosofis, dan sosial dari kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial melalui analisis data yang tidak terstruktur.[5]

Selain itu dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti guru pendidikan agama, siswa, dan pengelola sekolah. Metode ini bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang implementasi prinsip moderasi di lapangan. Wawancara itu penting untuk memahami pandangan subjek penelitian tentang kebijakan tertentu.[6]

Observasi partisipatif digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai moderasi diterapkan dalam proses belajar-mengajar, kegiatan keagamaan di sekolah, atau program masyarakat. Observasi ini membantu mengidentifikasi tantangan dan

[3] Fauzan Adhim, *Pendidikan Islam dan Tantangan Pluralisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 103-105

[4] Mohammad Zuhdi, *Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in an Era of Religious Radicalization and Disruption Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 79-81)

[5] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6-8

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 130-132

keberhasilan dalam implementasi moderasi beragama. Observasi partisipatif memberikan data empiris yang mendukung analisis lebih lanjut[7].

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama terkait tantangan, strategi, dan dampak moderasi beragama berdasarkan KMA No. 450., Analisis tematik membantu menyusun data ke dalam tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian[8].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam KMA No. 450 diterapkan dalam pendidikan dan kehidupan beragama di Indonesia?

Prinsip-prinsip moderasi beragama yang diatur dalam KMA No. 450 mencakup elemen-elemen utama yang dirancang untuk membangun keberagamaan yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia di antaranya :

a. Toleransi (Tasamuh)

Prinsip toleransi dalam KMA No. 450 mengedepankan sikap saling menghormati di antara individu atau kelompok agama yang berbeda. Nilai ini mencakup penghormatan terhadap kebebasan beragama dan penghindaran diskriminasi atas dasar keyakinan. Toleransi merupakan dasar untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pendidikan agama yang menanamkan nilai-nilai keberagamaan yang menghargai perbedaan[9].

b. **Keseimbangan (Tawazun)**

Moderasi beragama juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam bersikap, baik dalam menjalankan ibadah maupun interaksi sosial., Keseimbangan menghindarkan seseorang dari ekstremisme dan fanatisme. KMA No. 450 menjadikan nilai tawazun sebagai pedoman untuk menyesuaikan ajaran agama dengan dinamika sosial di era kontemporer[10].

c. Keadilan (I'tidal)

Prinsip keadilan mendorong umat beragama untuk bersikap adil dalam berinteraksi dengan sesama, baik yang seagama maupun berbeda agama. Moderasi beragama mencakup sikap netral dalam konflik, serta menghindari diskriminasi dalam bentuk apa pun.[11] KMA No. 450 menggarisbawahi pentingnya keadilan sebagai landasan untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai.

d. Penghormatan terhadap Kebhinekaan

Moderasi beragama mendorong penghormatan terhadap kebhinekaan sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Moderasi beragama membantu memperkuat semangat nasionalisme melalui penghargaan terhadap perbedaan etnis, budaya,

---

[7] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45-46

[8] Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 185-186

[9] Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Beragama: Dari Konsep ke Implementasi* (Jakarta: Kementerian Agama, 2020), hlm. 31-32

[10] Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 88-89

[11] Mohammad Zuhdi, *Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in an Era of Religious Radicalization and Disruption Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 81-83),

dan agama[12]. KMA No. 450 mengintegrasikan nilai ini dalam berbagai kegiatan pendidikan dan sosial untuk memperkuat harmoni antarumat beragama.

e. **Anti-Ekstremisme**

Sebagai prinsip terakhir, moderasi beragama menurut KMA No. 450 berfungsi sebagai benteng terhadap ekstremisme. Moderasi beragama adalah upaya preventif terhadap penyebaran radikalisme, terutama di kalangan generasi muda. Implementasinya terlihat dalam kurikulum pendidikan agama yang mengajarkan sikap kritis terhadap ideologi ekstrem[13].

KMA ini mengarahkan lembaga pendidikan agama di Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam pembelajaran dan praktik kehidupan sehari-hari. Prinsip ini mencakup tiga pilar utama: penguatan wawasan kebangsaan, pengembangan sikap toleransi, dan penanaman nilai anti-ekstremisme[14].

Penerapan nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui integrasi kurikulum pendidikan agama Islam yang melibatkan materi tentang pluralisme, saling menghargai, dan dialog antaragama. Langkah ini penting untuk menghindari konflik horizontal berbasis agama dan mendorong harmoni sosial dalam masyarakat majemuk[15].

KMA No. 450 secara signifikan memengaruhi kebijakan pendidikan keagamaan melalui pendekatan kurikulum dan kebijakan pembelajaran berbasis moderasi. Keputusan ini mempertegas bahwa moderasi harus menjadi inti dari sistem pendidikan agama di semua tingkat. Kebijakan ini memperkuat kurikulum yang inklusif, mengakomodasi pandangan lintas agama, serta menanamkan pemahaman tentang keberagaman[16].

Selain itu, pengaruh kebijakan ini tampak jelas pada pembinaan karakter siswa, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran lintas budaya dan agama. KMA No. 450 juga mendorong guru untuk menjadi teladan dalam menerapkan sikap moderat, baik dalam pengajaran maupun interaksi dengan siswa[17].

Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti resistensi dari kelompok konservatif tertentu dan keterbatasan sumber daya. Seperti diungkapkan oleh upaya pengintegrasian moderasi beragama membutuhkan dukungan pelatihan bagi pendidik dan penyediaan materi ajar yang relevan untuk menjawab kebutuhan generasi muda.

---

[12] Fauzan Adhim, *Pendidikan Islam dan Tantangan Pluralisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 103-105

[13] Zainal Arifin, *Membangun Toleransi Antarumat Beragama* (Bandung: Rosda, 2021), hlm. 47-49

[14] Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Beragama: Dari Konsep ke Implementasi* (Jakarta: Kementerian Agama, 2020), hlm. 29-31

[15] Abdul Munir Mulkhan *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Umat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 65-66

[16] Fauzan Adhim, *Pendidikan Islam dan Tantangan Pluralisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 101-103

[17] Zainal Abidin**,** *Moderasi Beragama sebagai Strategi dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 43-45)

Dampak KMA No. 450 terhadap pembentukan sikap moderat di kalangan siswa dan masyarakat,

KMA No. 450 menekankan pentingnya toleransi sebagai bagian dari nilai moderasi beragama. Dengan integrasi nilai ini ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam, siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan dan budaya. Hal ini terbukti dari peningkatan interaksi sosial yang inklusif antar siswa dari berbagai latar belakang agama. Pendidikan berbasis moderasi berperan dalam mengurangi konflik berbasis agama di sekolah-sekolah negeri[18].

Melalui kebijakan ini, masyarakat mulai menunjukkan pemahaman lebih baik tentang pentingnya moderasi dalam praktik keagamaan. Nilai seperti keadilan dan keseimbangan tercermin dalam kegiatan masyarakat, seperti forum dialog antaragama. Program berbasis KMA No. 450 memfasilitasi dialog yang sehat di tingkat masyarakat untuk mengurangi potensi konflik sektarian[19].

Dampak nyata lainnya adalah berkurangnya kasus intoleransi di sekolah yang mengadopsi prinsip moderasi beragama. Pendidikan berbasis nilai keadilan dan penghormatan terhadap kebinekaan membantu siswa memahami pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Pengajaran nilai moderasi di kelas berdampak langsung pada perilaku siswa dalam berinteraksi dengan rekan-rekan mereka yang berbeda agama[20].

Meski dampaknya signifikan, implementasi KMA No. 450 masih menghadapi hambatan, seperti resistensi dari kelompok tertentu dan keterbatasan sumber daya pendidikan. Kurangnya pelatihan bagi pendidik dalam mengajarkan nilai-nilai moderasi seringkali menjadi kendala utama dalam mewujudkan tujuan kebijakan ini[21].

KMA No. 450 juga memengaruhi kebijakan sosial, seperti peningkatan peran lembaga keagamaan dalam mengadvokasi toleransi. Pendekatan berbasis moderasi mampu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dengan menghilangkan ideologi ekstrem[22].

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip moderasi beragama berdasarkan KMA No. 450. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan pendidik, siswa, dan masyarakat tentang konsep moderasi beragama. Hal ini sering disebabkan oleh minimnya literatur atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik untuk memahami nilai-nilai yang diusung KMA No. 450. Pemahaman yang memadai, prinsip moderasi sulit diterapkan secara efektif di lingkungan pendidikan dan masyarakat[23].

---

[18] Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Beragama: Dari Konsep ke Implementasi* (Jakarta: Kementerian Agama, 2020), hlm. 57-59

[19] Mohammad Zuhdi, *Transformasi Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang* (Bandung: Mizan, 2021), hlm. 112-114

[20] Zainal Arifin, *Moderasi Beragama sebagai Strategi dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi, Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 23-25

[21] Fauzan Adhim, *Pendidikan Islam dan Tantangan Pluralisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 102-104

[22] Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 135-137

[23] Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Beragama: Dari Konsep ke Implementasi* (Jakarta: Kementerian Agama, 2020), hlm. 62-64

Kelompok tertentu yang berpegang teguh pada pemahaman keagamaan eksklusif sering kali menolak prinsip moderasi beragama, menganggapnya sebagai kompromi terhadap nilai-nilai agama. Resistensi ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang toleran dan harmonis[24].

Keterbatasan sumber daya, seperti materi ajar, buku teks, dan pelatihan guru, menjadi kendala signifikan dalam implementasi prinsip moderasi beragama. Banyak sekolah, khususnya di daerah terpencil, tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengajarkan nilai-nilai moderasi secara menyeluruh[25].

Di era digital, arus informasi yang tidak terkontrol sering kali menjadi tantangan besar. Penyebaran paham ekstremisme melalui media sosial dapat berlawanan dengan upaya moderasi beragama. Strategi pemerintah harus mencakup pendekatan digital untuk menghadapi tantangan ini[26].

Implementasi KMA No. 450 juga menghadapi hambatan di tingkat kebijakan, seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sering menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Perbedaan interpretasi dan pendekatan dalam kebijakan pendidikan agama sering kali menjadi kendala dalam penerapan nilai moderasi[27].

Strategi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Moderasi Beragama Berdasarkan KMA No. 450

Strategi utama adalah memberikan pelatihan intensif kepada guru dan pendidik tentang prinsip-prinsip moderasi beragama. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum. Terstruktur dapat mengatasi kesenjangan pemahaman di kalangan pendidik dan memastikan nilai moderasi diterapkan secara konsisten[28].

Untuk mengatasi minimnya sumber daya, pemerintah perlu menyediakan materi ajar yang relevan, termasuk buku, modul, dan konten digital. Distribusi sumber daya yang merata, terutama di daerah terpencil, sangat penting untuk mendukung implementasi moderasi beragama[29].

Menggunakan media sosial dan platform digital sebagai alat kampanye dapat membantu menyebarkan pesan moderasi secara luas dan melawan narasi ekstremisme. Pendekatan berbasis teknologi sangat efektif untuk menjangkau generasi muda, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh media digital[30].

---

[24] Mohammad Zuhdi, *Transformasi Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang* (Bandung: Mizan, 2021), hlm. 125-127

[25] Fauzan Adhim, *Pendidikan Islam dan Tantangan Pluralisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 115-117

[26] Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 147-149

[27] Zainal Abidin, *Moderasi Beragama sebagai Strategi dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi, Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 10, No. 2, 2020), hlm. 32-34

[28] Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Beragama: Dari Konsep ke Implementasi* (Jakarta: Kementerian Agama, 2020), hlm. 71-73

[29] Fauzan Adhim, *Pendidikan Islam dan Tantangan Pluralisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 118-120

[30] Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 152-154

Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keagamaan diperlukan untuk memastikan kebijakan moderasi beragama diterapkan secara seragam. Pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efektivitas program moderasi[31].

Forum ini dapat menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan toleransi antarumat beragama. Melalui dialog, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya hidup harmonis dalam keberagaman., Kegiatan seperti ini telah terbukti berhasil mengurangi ketegangan antar kelompok agama di beberapa daerah[32].

SIMPULAN

Prinsip-prinsip moderasi beragama yang tertuang dalam KMA No. 450 berlandaskan nilai-nilai seperti toleransi, keseimbangan (tawazun), keadilan (i'tidal), penghormatan terhadap kebhinekaan, dan anti ekstremisme.

Prinsip-prinsip utama yang diterapkan adalah keseimbangan (tawazun), toleransi (Tasamuh), keadilan (Adalah), dan kemitraan (Syura). Implementasi moderasi beragama juga menekankan pentingnya dialog dan kerja sama antarumat beragama untuk mengatasi konflik sosial.

Dampaknya terlihat dalam pengurangan sikap intoleransi di kalangan siswa, peningkatan pemahaman tentang pentingnya pluralisme, serta penguatan harmoni antarumat beragama di masyarakat. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya. KMA No. 450 memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang moderat, toleran, dan mampu menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia

Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan moderasi beragama menurut KMA No. 450 adalah Penguatan Sosialisasi dan Edukasi, Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan, Penyediaan Sumber Daya Pembelajaran, Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga, Pemanfaatan Teknologi Digital, dan Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan.

Strategi-strategi ini diharapkan dapat mengatasi hambatan seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya sumber daya, dan minimnya pemahaman terkait prinsip moderasi beragama, serta mendukung implementasi KMA No. 450 secara efektif di pendidikan dan masyarakat

DATAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. (2020). *Moderasi Beragama sebagai Strategi dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi Jurnal Pendidikan Islam* , Vol. 8, No. 2

[31] Mohammad Zuhdi, *Transformasi Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang* (Bandung: Mizan, 2021), hlm. 130-132

[32] Zainal Arifin, *Moderasi Beragama sebagai Strategi dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi, Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 40-42

Adhim, Fauzan. (2019). *Pendidikan Islam dan Tantangan Pluralisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arifin, Zainal . *(2021). Moderasi Beragama sebagai Strategi dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi, Jurnal Pendidikan Islam* , Vol. 10, No. 1

Arifin,, Zainal. (2021). *Moderasi Beragama sebagai Strategi dalam Pendidikan Islam di Era Disrupsi, Jurnal Pendidikan Islam* , Vol. 10, No. 1

Bungin, Burhan. (2019). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* , Jakarta: Kencana

Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* , Thousand Oaks: Sage Publications

M. Hanafi, Muchlis. (2020). *Moderasi Beragama: Dari Konsep ke Implementasi* , Jakarta: Kementerian Agama

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulkhan, Abdul Munir. (2004). *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Umat* , Yogyakarta: Tiara Wacana

Saeed, Abdullah. (2009). *Islamic Thought: An Introduction*, Jakarta: Serambi

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan* , Bandung: Alfabeta

Zuhdi, Mohammad . (2021). *Transformasi Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang* , Bandung: Mizan

Zuhdi, Mohammad. (2020). *Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in an Era of Religious Radicalization and Disruption Jurnal Pendidikan Islam* , Vol. 8, No. 2